



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**UNIT KERJA** : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I PUTU ADIPHTA EKAPUTRA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 746254

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.600.000.000

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI  
Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/45 m2 di KAB / KOTA  
BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 442 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI  
Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI  
Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 1100 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL  
SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 20.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CORONA 2000 Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp.  
20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 49.700.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 499.892.192

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.169.592.192

**III. HUTANG** Rp. 484.859.853

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.684.732.339

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.